



Pemkot Sosialisasikan Zero Sampah

Antisipasi TPST Piyungan, Awal 2023 Tutup 13 Depo

JOGJA, Radar Jogja - Kota Jogja memasuki fase darurat sampah. Awal tahun depan, tepatnya mulai Januari 2023 sebanyak 13 depo milik Pemkot Jogja resmi ditutup bagi pembuangan sampah jenis anorganik. Langkah itu sebagai tindakan antisipasi. Sebab, tahun depan diperkirakan kapasitas TPST Piyungan, Bantul, sudah tidak mencukupi. Tidak lagi mampu menampung sampah.

Sekda Kota Jogja Aman Yuradijaya mengatakan, penutupan depo dilakukan untuk menekan sampah jenis anorganik. Jumlahnya yang terus meningkat. Kebijakan ini selaras dengan program zero sampah anorganik yang telah dicanangkan pemkot.

"Targetnya, tahun depan Kota Jogja sudah tidak memiliki jenis sampah anorganik," kata Aman kemarin (25/11). "Langkah tersebut dilakukan agar umur TPST Piyungan semakin panjang," lanjutnya.

Aman menjelaskan, berdasarkan peraturan perundang-undangan, sampah merupakan tanggung jawab sumber sampah. Penanganan sampah membutuhkan peran dan kesadaran masyarakat. Tindakan pertama yang harus dilakukan adalah memilah sampah.

"Memilah antara jenis organik dan anorganik," kata mantan kepala Bappeda Kota Jogja ini.

Jenis sampah anorganik yang dihasilkan warga Kota Jogja mencapai sekitar 104 ton per hari. Persentasenya 40 persen dari total sampah sebanyak 260 ton per hari. Sisanya 60 persen atau sekitar 156 ton merupakan sampah jenis organik.

Penanganan kedua jenis sampah tersebut berbeda. Khusus sampah anorganik, pemkot menggunakan konsep memaksa. Yakni memaksa

masyarakat tidak membuang sampah di depo. Sedangkan, penanganan jenis sampah anorganik adalah mengurangi.

"Tahun depan kami targetkan sampah yang dikirim ke TPST Piyungan hanya sekitar 156 ton. Sisanya 104 ton ditangani sendiri oleh masyarakat," kata Aman.

Untuk jenis sampah anorganik, masyarakat bisa menyalurkan sampah tersebut kepada pelapak. Selain itu, bisa disalurkan melalui bank sampah untuk didaur ulang sebagai barang-barang yang bernilai jual. Sedangkan, jenis sampah organik bisa dimanfaatkan sebagai penunjang bahan tanaman.

"Kita tidak hanya berbicara teknologi. Tapi lebih pada perubahan perilaku sosial masyarakat," tandasnya.

Pengelolaan sampah organik pun juga menjadi perhatian. Selama ini sudah dikembangkan biopori jumbo berbasis komunal. Setiap RW hanya ada satu biopori jumbo. Ternyata masyarakat kurang antusias memanfaatkannya. Basis komunal tersebut diubah menjadi basis keluarga atau rumah tangga.

"Itu memudahkan bagi masyarakat. Saat mereka sedang mengelola dapur, langsung bisa membuang ke tempat itu," jelasnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jogja Sugeng Darmanto sudah bersiap-siap menyosialisasikan program zero sampah tersebut. Awal Desember ini akan diinformasikan kepada masyarakat terkait program itu. Selanjutnya, digelar sarasehan di 14 kecamatan.

DLH Kota Jogja juga berencana mengubah tarif pelayanan pengambilan sampah rumah tangga. Selama ini, dikenakan tarif flat Rp 2.000. Mulai tahun depan dikenakan tarif sesuai dengan volume sampah yang dihasilkan. "Biar adil, antara yang membuang banyak dan sedikit tarifnya berbeda," kata Sugeng. **(kus/laz/by)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005